



LAPORAN

Pemantauan dan Evaluasi Manajemen risiko dan Rekomendasinya

Disusun oleh
**TIM SKI BKK KELAS I
BANDUNG**

LAPORAN

PEMANTAUAN DAN EVALUASI MANAJEMEN RISIKO DAN REKOMENDASINYA

BKK KELAS I BANDUNG – TAHUN 2024

A. Pendahuluan

Kementerian Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan dan berkewajiban melaksanakan pembangunan kesehatan yang berada dalam kewenangannya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan nasional. Perwujudan pembangunan kesehatan dilakukan oleh Kementerian kesehatan melalui berbagai upaya yang dituangkan ke dalam berbagai program/ kegiatan untuk mendukung sasaran strategis Kementerian Kesehatan.

Dalam perjalanan pencapaian sasaran strategis Kementerian Kesehatan telah melakukan upaya transformasi sistem kesehatan namun upaya ini tidak lepas dari adanya risiko-risiko yang dihadapi dalam pelaksanaan transformasi tersebut. Risiko pada dasarnya harus dikendalikan melalui penerapan sistem intern sebagaimana tercantum dalam PP Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dimana setiap pimpinan instansi pemerintah harus melakukan pengendalian intern di lingkungan kerjanya.

Untuk melaksanakan penerapan SPIP dibutuhkan komitmen yang kuat dalam pelaksanaan manajemen risiko diseluruh tingkat Kementerian. Manajemen risiko merupakan kunci keberhasilan untuk mengelola risiko atau ketidakpastian yang dapat menghambat pencapaian tujuan yang dihadapi oleh Kementerian Kesehatan. Untuk menciptakan tata kelola pemerintah yang baik, diperlukan penerapan manajemen risiko dalam sistem pengendalian intern, sehingga setiap satuan kerja harus dibentuk tim manajemen risiko.

Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) Kelas I Bandung merupakan UPT Kementerian Kesehatan yang sejak tahun 2023 secara aktif telah terbentuk tim SPIP maupun tim Manajemen Risiko. Selain itu BKK Bandung telah memiliki tim Satuan Kepatuhan Internal (SKI) yang salah satunya memiliki peran didalam melakukan pemantauan dan evaluasi pengendalian internal yang dikelola atau dilaksanakan oleh Tim Manajemen Risiko berkolaborasi dengan Tim SPIP. Agar pengelolaan manajemen risiko berjalan efektif secara berkala dilakukan pemantauan dan evaluasi serta rekomendasi dari upaya pengendalian risiko di internal BKK Bandung.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
3. Permenkes Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
4. Kepmenkes Nomor : HK.01,07/ MENKES/ 1354/ 2024 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

C. Tujuan Pemantauan Risiko

Tujuan dilakukannya upaya pemantauan atau monev pengelolaan risiko dilihat dari rencana pengendalian dan tindakan pengendalian yang ada, dengan tujuan untuk:

1. Mengetahui risiko yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan/ operasional kegiatan;
2. Mengetahui efektif atau tidak efektif upaya pengendalian risiko yang dilakukan;
3. Mengidentifikasi strategi prioritas dalam mengatasi risiko;
4. Meminimalkan risiko dengan mengidentifikasi dan memastikan adanya pertahanan yang cukup untuk mencegahnya;
5. Meningkatkan kepatuhan, keselamatan serta mengurangi kerugian yang terjadi dalam organisasi.

D. Waktu Kegiatan

Sesuai dengan surat undangan nomor: MR.01.02/C.X.5/3033/2024, bahwa tim SKI BKK Bandung melakukan reviu atau telaahan terhadap upaya pengendalian risiko di masing-masing tim kerja BKK Bandung, yang dilaksanakan 2 hari pada tanggal :

1. Senin, 4 November 2024 pukul 09.00 sd selesai : melakukan reviu pengendalian Manajemen risiko pada tim kerja 1 sampai dengan tim kerja 5;
2. Selasa, 5 November 2024 pukul 09.00 sd 11.00 : melakukan reviu pengendalian terhadap manajemen risiko di bagian Administrasi dan Umum.

E. Hasil Pemantauan

- Rapat dibuka oleh Yani Dwiyuli Setiani selaku ketua SKI dan dr. Sedya Dwisangka, M.Epid selaku Kepala Balai;
- Penyampaian hasil penilaian mandiri SPIPT Tahun 2024 oleh Nurul Afifa selaku ketua Tim Penilai SPIP;
- Dokumen manajemen risiko harus sudah mulai disusun oleh masing-masing Timker sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan, yang berdasarkan proses bisnis/ SOP di BKK Kelas I Bandung;

- Untuk Tim SKI tidak menyusun laporan manajemen risiko, namun hanya berupa catatan atau laporan reviu saja, apakah ada masukan, tambahan koreksi dan tau rekomendasi. Adapun hasil pemantauan terhadap evaluasi pengendalian di masing-masing tim kerja adalah sebagai berikut :

1. Reviu Tim Kerja 3 (Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan)

- o Ada 7 risk register tim kerja 3 namun yang menjadi prioritas ada 2 kegiatan yang sudah dilakukan manajemen risiko (penerbitan SLHS dan pengawasan pangan di Embarkasi)

PERINGKAT RISIKO	PERNYATAAN RISIKO	PENANGANAN RISIKO						STATUS RISIKO	
		AKSI / PENGENDALIAN	OUTPUT	TARGET	REALISASI	WAKTU IMPLEMENTASI	PENANGGUNG JAWAB	TREN	LEVEL RISIKO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	TIMKER 3								
1	Hasil inspeksi tidak memenuhi syarat kesehatan	sosialisasi tentang hygiene sanitasi TPP	Laporan Hasil Inspeksi hygiene sanitasi	1 kali setahun		September	Timker 3	control mitigate	tinggi
2	Jemaah haji mengkonsumsi makanan minuman yang kurang layak	Menempatkan jadwal petugas uji lebih dari 1 orang	laporan pelaksanaan uji organoleptik	1 kali setahun		Embarkasi Haji	Timker 3	control mitigate	sedang

- o Dalam penerbitan SLHS ada upaya pengendaliannya dengan sosialisasi, namun untuk melihat keberhasilan dari sosialisasi tersebut belum ada alat ukurnya;
- o Upaya pengendalian lainnya yaitu :melakukan sosialisasi saat penyuluhan penjamah makanan catering haji, bisa melalui video atau pembuatan banner dan semua kegiatan tersebut harus didokumentasikan dengan baik sebagai bukti dukung;
- o Untuk Jemaah haji mengkonsumsi makanan minuman yang kurang layak sebagai penyebab, sedangkan risikonya adalah terjadinya penyakit akibat makanan.

2. Reviu Timker 5 (Layanan Publik dan Zona Integritas)

- a. Dari 7 risk register, ada 3 risiko prioritas dengan status risiko level tinggi , yaitu:

PERINGKAT RISIKO	PERNYATAAN RISIKO	PENANGANAN RISIKO						STATUS RISIKO	
		AKSI / PENGENDALIAN	OUTPUT	TARGET	REALISASI	WAKTU IMPLEMENTASI	PENANGGUNG JAWAB	TREN	LEVEL RISIKO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	TIMKER 5								
1	Jumlah Responden tidak terkumpul sesuai target dan sasaran sehingga data yang didapat tidak memenuhi syarat	Form Survey Kepuasan Masyarakat manual dan link barcode	Jumlah responden meningkat	Setiap bulan, Triwulan	Setiap bulan, Triwulan	Setiap bulan	Pengelola Survey Kepuasan Pelanggan	control mitigate	Tinggi
2	Tidak ada aduan dan atau semua/beberapa pengaduan masyarakat tidak tertangani	pengaduan online (melalui media sosial) dibuat semenarik mungkin sehingga pelanggan mau menyampaikan keluhan dan sarannya	Pengaduan tertangani dengan baik	Setiap bulan, Triwulan	Setiap bulan, Triwulan	Setiap bulan	Pengelola Pengaduan Masyarakat dan PPID	control mitigate	Tinggi
3	laporan gratifikasi tidak di tindaklanjuti	Lapor melalui media sosial (dumas dalam kategori pengawasan)	Laporan dan Tindak Lanjut Gratifikasi	Setiap bulan	Setiap bulan	Setiap bulan	Unit Pengelola Gratifikasi	control mitigate	Tinggi

- b. Sudah tersedia saluran SP4N lapor namun sampai dengan sekarang belum ada aduan yang masuk bisa jadi karena kurangnya sosialisasi di internal maupun eksternal
3. Reviu Timker 1 (Surveilans dan Penindakan Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan)
 - a. Berdasarkan risk register timker 1 ada 6 risiko , namun hanya ada 1 risiko prioritas untuk kegiatan surveilans (data tidak tersaji dengan tepat)

PERINGKAT RISIKO	PERNYATAAN RISIKO	PENANGANAN RISIKO					
		AKSI / PENGENDALIAN	OUTPUT	TARGET	REALISASI	WAKTU IMPLEMENTASI	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	TIMKER 1						
1	Data tidak dapat dianalisis dan disajikan dengan tepat	Himbauan melalui group chat tim kerja 1 yang berisi daftar data yang harus dikumpulkan, <i>dateline</i> serta penanggungjawab pengumpulan data	Himbauan Ketua Tim Kerja 1	4 himbauan	3 himbauan	selama tahun 2024	Ketua Tim Kerja 1

- b. Tindakan pengendalian terhadap risiko bahwa data tidak tersaji dengan tepat melalui himbauan dirasakan kurang efektif sehingga muncul pengembangan dari pengendalian sebelumnya) yaitu dengan membuat manajemen bank data;

4. Reviu Timker 2 (Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Alat Angkut dan Barang)

- a. Ada 9 risiko prioritas yang di munculkan (semua risiko tim kerja 2 ada 9)

PERINGKAT RISIKO	PERNYATAAN RISIKO	PENANGANAN RISIKO						STATUS RISIKO	
		AKSI / PENGENDALIAN	OUTPUT	TARGET	REALISASI	WAKTU IMPLEMENTASI	PENANGGUNG JAWAB	TREN	LEVEL RISIKO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	TIMKER 2								
1	Keterlambatan informasi kedatangan kapal	Membangun jejaring dengan lintas sektor dan agen pelayaran	Tranfer Knowledge	Agen menginformasikan kedatangan kapal tepat waktu	Mencapai target	Selama Tahun 2024	Timker 2	Control Mitigate	Sangat rendah
2	Terjadi nya kecelakaan kerja seperti terjatuh atau tertimpa benda lain selama di dermaga atau di kapal	Pengadaan APD sesuai standar	Peningkatan Kompetensi	Nihil kejadian kecelakaan kerja	Mencapai target	Selama Tahun 2024	Timker 2	Control Mitigate	Sedang
3	Terjadinya gratifikasi yang dapat mempengaruhi dalam menuliskan hasil pemeriksaan sanitasi kapal	Pakta integritas untuk menolak gratifikasi	Tranfer Knowledge	Nihil laporan tindakan gratifikasi	Mencapai target	Selama Tahun 2024	Timker 2	Control Mitigate	Sedang
4	Tindakan penyehatan kapal tidak berjalan sesuai prosedur	Bimbingan teknis dan assesment kompetensi petugas	Peningkatan Kompetensi	Petugas kompeten	Mencapai target	Selama Tahun 2024	Timker 2	Control Mitigate	Rendah
5	Penyakit menular dari pelaku perjalanan	Menerbitkan surat edaran kewaspadaan yang ditujukan kepada stakeholder di lingkungan pelabuhan/bandara	Tranfer Knowledge	Kru alat angkut melaporkan risiko penyakit menular pada penumpang	Mencapai target	Selama Tahun 2024	Timker 2	Control Mitigate	Sedang
6	Data kapal tidak diisi dengan benar	Membangun jejaring dengan agen pelayaran	Tranfer Knowledge	Data kapal diisi dengan benar	Mencapai target	Selama Tahun 2024	Timker 2	Control Mitigate	Sedang

7	Kapal tidak berada di zona karantina	Membangun jejaring dengan agen pelayaran	Tranfer Knowledge	Kapal mematuhi aturan karantina	Mencapai target	Selama Tahun 2024	Timker 2	Control Mitigate	Rendah
8	Kesalahan dalam menerbitkan dokumen kekarantinaan kesehatan pada alat angkut	Bimbingan teknis terkait juknis penerbitan dokumen kekarantinaan kesehatan pada alat angkut	Peningkatan Kompetensi	Dokumen kekarantinaan kesehatan yang diterbitkan sesuai	Mencapai target	Selama Tahun 2024	Timker 2	Control Mitigate	Sedang
9	Tidak tercatatnya kegiatan penerbitan dokumen kekarantinaan kesehatan pada alat angkut di Sinkarkes	Memastikan jaringan internet stabil dan memadai	Antisipasi	T tercatatnya penerbitan dokumen kekarantinaan kesehatan alat angkut di Sinkarkes	Mencapai target	Selama Tahun 2024	Timker 2	Control Mitigate	Sedang

- b. Sebaiknya risiko yang memiliki level rendah dan sangat rendah tidak perlu dijadikan prioritas penanggulangan risiko;
- c. Data kapal tidak diisi dengan benar sebagai penyebab, risiko nya menjadi data tidak valid;
- d. Rencana pengendalian banyak di targetkan di lakukan di Februari tahun 2025;
- e. Dokumentasi perubahan setelah adanya pengendalian-->termasuk implementasi sshp pada pintu masuk Kertajati yg dilakukan utk pengawasan Mpox bagi pelaku perjalanan dari luar negeri selain itu utk pengendalian nya juga di pasang cctv pada alat thermal scanner utk melihat dari sisi surveilans syndromnya
- f. Rencana di th 2026 akan membuat pelatihan sea survival dan boarding safety (jika didukung anggaran)
- g. Inovasi digitalisasi harap diperkuat terutama utk Patimban sudah berjalan baik, di Cirebon juga sudah di sosialisasikan namun belum di cek, selanjutnya akan diterapkan di pel. Indramayu
- h. Inovasi harus menggambarkan proses bisnisnya bkk, itulah yg diperkuat dan diperlihatkan ke eksternal sbg nilai plus utk maju WBK nasional

5. Reviu Timker 4 (Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Orang, Kegawatdadruratan, dan Situasi Khusus)

- a. Ada 4 risiko yang di prioritas untuk ditangani yaitu:

PERINGKAT RISIKO	PERNYATAAN RISIKO	PENANGANAN RISIKO						STATUS RISIKO	
		AKSI / PENGENDALIAN	OUTPUT	TARGET	REALISASI	WAKTU IMPLEMENTASI	PENANGGUNG JAWAB	TREN	LEVEL RISIKO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	TIMKER 4								
1	Laporan dokumen dan atau aplikasi istithoah tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya di lapangan	Koordinasi dan sosialisasi dengan dinas kesehatan, KBIH meminta jamaah jujur tentang kesehatannya	Dokumen kesehatan haji yang sesuai keadaan sebenarnya	Segera dilakukan di embarkasi 2025		Setiap tahun mulai 2025	Control mitigate	Control mitigate	tinggi
2	Resiko penularan penyakit terhadap petugas dan jamaah pada saat pemeriksaan di asrama haji	Mengatur ulang alur pemeriksaan kesehatan jamaah haji di ruangan dengan banyak ventilasi	Alur pemeriksaan jamaah yang sesuai standar kesehatan	Segera dilakukan di embarkasi tahun 2025		Setiap tahun mulai 2025	control mitigate	control mitigate	rendah

3	Suhu refrigerator tidak sesuai dengan standar penyimpanan	Checklist Manual Monitoring Suhu	Checklist monitor suhu refrigerator per bulan Kalibrasi refrigerator per 6 bulan	segera dilakukan di bulan Oktober		Oktober sd Desember	Control Mitigate	Control Mitigate	sedang
4	Penyimpanan vaksin tidak disusun dengan teratur	Penerapan 5R	Pelatihan manajemen cold chain	mengikuti webinar atau sosialisasi secara online atau offline		September sd Desember	Control Mitigate	Control Mitigate	sedang

- b. Perlu penambahan risiko terkait gratifikasi pada saat pelayanan vaksinasi untuk pengendaliannya bisa dengan video antikorupsi, *banner* antikorupsi, pakta integritas, pelatihan antikorupsi, pemakaian pin WBK;
- c. Lengkapi bukti sosialisasi dengan Dinas Kesehatan tentang istithaah Haji;
- d. Mengatur ulang alur pemeriksaan kesehatan jemaah haji diganti menjadi sosialisasi PHBS;

6. Reviu Sub Bagian Administrasi dan Umum

Reviu pertama dari Adum dimulai dengan melihat :

1) Manrisk Kepegawaian :

- Manrisk yang dibuat ada 3 prioritas risiko, akan tetapi manrisk yang dibuat dikompilasi menjadi 1 tabel risiko;
- Berkurangnya jam kerja efektif ASN, sudah ada pengendalian, tetapi belum efektif maka dari itu harus kembali dilihat pengendalian yang akan diperbaiki lebih spesifik kemudian didokumentasikan.
- Keterlambatan penyampaian laporan lembur sehingga pembayaran lembur terkendala. Pengendalian adanya pengawasan dan audit lembur dapat melalui aplikasi absen. Dokumentasi membuat laporan rekap lembur belum ada.
- Pegawai belum memenuhi 20 JPL, sudah ada pengendalian berupa pemantauan dan mengingatkan pegawai jika ada peningkatan kapasitas. Pengendalian yang akan dilakukan berupa membuat nota dinas dari kepala Balai terkait pengumpulan bukti mengikuti pelatihan dengan mengupload ke aplikasi Sipedit.

2) Perbendaharaan

- Kegiatan pengajuan GUP (Ganti Uang Persediaan), Pengendalian sudah ada dan efektif. Jika ada error aplikasi, pengendalian yang bisa dilakukan dengan memonitoring *Hai DJPB* dengan koordinasi ataupun konsultasi ;
- Pembayaran Perjalanan dinas prioritas risiko SPJ perjalanan dinas tidak lengkap dan tidak sesuai, rencana pengendalian dan pengembangan sistem keuangan untuk mempermudah pembuatan dokumen dan upload laporan perjalanan dinas. Pengendalian sudah dilakukan hanya kurang efektif. Pengendalian lainnya yaitu melakukan konfirmasi kepada timker dengan mengadakan rapat untuk

keterlambatan realisasi anggaran. Pengendalian yang sudah ada juga dibuat Bank data untuk data keuangan.

- Laporan keuangan untuk prioritas risiko ada 3 yaitu Ba rekonsiliasi internal tidak sah. Pengendalian yang sudah ada BA Rekon menggunakan TTE di srikandi sudah efektif, yang belum efektif terkait manipulasi isi laporan keuangan dan memalsukan kepentingan. Yang belum efektif yaitu sosialisasi bending yang belum dilakukan. Pengendalian yang ditambahkan dengan media KIE terkait anti korupsi maupun bending.

3) Barang Milik negara (BMN)

- Ketidaksesuaian kode klasifikasi dengan fisik pengendalian belum efektif karena mengimplementasikan Aplikasi ABS BMN, dokumen kepemilikan hilang atau rusak. Pengendalian risiko membuat list dokumen kepemilikan di dalam brankas sudah efektif akan tetapi lis dokumen masih berproses.

4) Arsiparis

- Keterlambatan penerimaan surat dan *upload* surat ke Srikandi pengendalian yang ada sudah ada SOP. Pemusnahan arsip pengendalian sudah dijadwalkan retensi arsipnya. Dirasakan sudah efektif.

5) Perencana

- Data dukung kurang, tidak akurat pengendalian yang sudah ada surat pemberitahuan kepada timker dan rapat untuk koordinasi akan tetapi belum terlaksana sehingga pengendalian masih dirasakan kurang efektif.

6) Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)

- Risiko terlambat melakukan proses perencanaan PBJ pengendalian yang sudah ada yaitu jadwal pengadaan, risiko pemberian suap dan benturan kepentingan yang belum ada. Pengendalian yang ada berupa sosialisasi dan penggunaan atribut antikorupsi.

F. Rekomendasi

Berikut rekomendasi yang diberikan dari masing-masing tim kerja berdasarkan hasil pemantauan pengendalian risiko:

1. Tim Kerja 1

- a. Manajemen bank data sedang *on proses* dilakukan Timker 1 dengan menunjuk PJ masing-masing staf bertanggungjawab terhadap suatu data kegiatan yang ada atau menjadi tugas dan fungsi Timker 1;
- b. Pemberian arahan, rapat dan sebagainya harap didokumentasikan dengan baik sebagai bukti pengendalian agar data tersaji dengan tepat;
- c. Menambahkan risiko tentang distribusi ICV klinik oleh PT. Pos, karena hal tersebut dapat dikatakan inovasi jika terdapat manajemen risikonya;

- d. Aplikasi siAbahjawara tidak diperasionalkan sehingga harus dihapus dari DIPA BKK Bandung agar tidak jadi temuan. Alasan tidak dipakai karena dirasakan aplikasi ini sudah tidak bisa mempermudah pekerjaan namun sebaliknya.

2. Tim Kerja 2

- a. Rencana pengendalian banyak ditargetkan dilakukan di Februari tahun 2025, namun sudah ada yang di realisasikan seperti peningkatan kompetensi bagi SDM yaitu mengirim 2 staf Timker 2 untuk mengikuti pelatihan tindakan pengendalian pada alat angkut yang dilaksanakan di Oktober 2024;
- b. Peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan sea survival dan boarding safety yang akan diusulkan melalui anggaran 2026;
- c. Membuat jadwal sosialisasi melalui media masa yang dimiliki BKK Bandung seperti pembuatan video animasi kesehatan kerja,dll;
- d. Pengembangan aplikasi digitalisasi kapal selama ini baru kembangkan di Pelabuhan Cirebon dan Pelabuhan Patimban , hendaknya semua pelabuhan yang menjadi wilayah kerja BKK kelas I Bandung juga terus dikembangkan. Selain itu perlu juga di cek atau di konfirmasi secara berkala tentang pengisian digitalisasi apakah sudah benar atau tidak dan berlaku di semua wilker;
- e. Segala inovasi didalam proses bisnis di BKK Bandung harus dimunculkan dan segala risiko yang muncul harus didokumentasi dan berkoordinasi sesuai dengan alur koordinasi untuk segera di kendalikan.

3. Tim Kerja 3

- a. Dalam penerbitan SLHS ada upaya pengendaliannya dengan sosialisasi, namun untuk melihat keberhasilan dari sosialisasi tersebut belum ada alat ukurnya;
- b. Sehingga harus ada alat ukur thp upaya pengendalian (perbandingan sebelum dan setelah sosialisasi) bisa dengan dilakukan pretest dan post test sebagai alat ukur untuk mengetahui adanya perubahan dari pemberian sosialisasi/tindaklanjut yang dilakukan atau bisa dari form hasil IKL yang dibandingkan dari sebelum dan sesudah terhadap perubahan perilaku/ phbs;
- c. Membuat jadwal sosialisasi kepada catering (pemenang tender haji)--> (bisa dilaksanakan saat penyuluhan penjamah).

4. Tim Kerja 4

- a. Bukti pengendalian agar dilengkapi (*screenshot* SISOVI dan ceklis);
- b. Bagian IT sebaiknya melakukan pengecekan awal setiap pagi sebelum pelayanan terutama untuk aplikasi yang digunakan;
- c. Video alur pelayanan vaksinasi belum ditampilkan;
- d. Alur pembayaran dan penyuntikan seringkali membingungkan kepada penerima layanan;

- e. Harus dipastikan apakah ada penganggaran di tahun 2025 untuk pembelian monitor suhu yang bisa dipantau melalui handphone (suhu refrigerator) dan pemecah *ampoule*;
 - f. Bisa juga digunakan *cctv logtag* untuk pemantauan suhu di refrigerator;
 - g. *Screenshoot* materi pelatihan manajemen *cold chain* berikut sertifikatnya sebagai bukti pengendalian;
 - h. Peningkatan dan pengembangan SDM dengan mengikuti pelatihan manajemen vaksinasi termasuk didalamnya ada materi manajemen coldchain.
5. Tim Kerja 5
- a. Perlu ada sosialisasi internal untuk informasi adanya hotline dumas yang baru, jika sudah dilakukan, sertakan buktinya atau *screenshoot* termasuk proses pengajuan akun untuk GOL KPK dimana Timker 5 sudah bersurat namun belum ada tindak lanjut dari pusat;
 - b. Rencana pengendalian dibuat satu dokumen untuk pengendalian yang telah tercapai;
 - c. Membuat jadwal sosialisasi untuk kegunaan SP4N Lapor baik dikalangan internal maupun eksternal, baik langsung maupun di pasang di media sosial BKK Bandung.
6. Sub Bagian Adum
- a. Pengendalian pada berkurangnya jam kerja efektif ASN harus lebih spesifik lagi lalu jika ada progress kearah lebih baik maka harus didokumentasikan;
 - b. Perlu adanya mekanisme pengawasan dan audit lembur agar risiko pembayaran keterlambatan uang lembur tidak terjadi lagi. Hal ini bisa di kombinasi melalui aplikasi absensi;
 - c. Pengendalian lainnya untuk pembayaran perjadi agar tidak berisiko kerugian keuangan yaitu melakukan konfirmasi kepada timker dengan mengadakan rapat untuk keterlambatan realisasi anggaran. Pengendalian yang sudah ada juga dibuat "Bank Data" khusus untuk data keuangan;
 - d. Segera laksanakan sosialisasi benturan kepentingan terkait manipulasi isi laporan keuangan dan memalsukan kepentingan. Pengendalian yang ditambahkan dengan media KIE terkait anti korupsi maupun benteng;
 - e. Kode klasifikasi BMN segera di buat juga untuk pengendalian risiko lainnya di BMN yaitu membuat list dokumen BMN agar segera dilakukan serta. Update pelabelan BMN untuk mengetahui mobilisasi barang dan keberadaan barang serta label BMN harus yang mudah terlihat;
 - f. Dokumen perencanaan yang tidak sesuai harus di koreksi dengan jukren, SBM, dan SBK dan membuat ST untuk mengikuti sosialisasinya;
 - g. Dalam proses perencanaan PBJ pengendalian risiko pemberian suap dan benturan kepentingan harus reviu dan dilibatkan adanya tim SKI

G. Dokumentasi



H. Penutup

Demikian penyusunan laporan pemantauan dan evaluasi manajemen risiko yang ada di Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Bandung selama tahun 2024. Besar harapan agar masing-masing tim kerja dapat menindaklanjuti hasil pengendalian risiko seperti rekomendasi yang diberikan diatas sehingga capaian strategis organisasi dapat tercapai semaksimal mungkin.

Penyusun



Yani Dwiyuli Setiani, SKM.,MKM
Sekretaris Tim Manajemen Risiko

